



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUH. NUR
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 500733

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>180.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 989 m2/70 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, WARISAN Rp. 180.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>6.000.000</b>
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>50.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	<b>500.000</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>600.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	<b>14.000.000</b>
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>201.150.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>147.600.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>53.550.000</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RADEN DWI TEGUH WIJANARKO
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 633352

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	395.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 540 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 360.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/20 m2 di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	63.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA BY8A/T125 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	1.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	459.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	140.240.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	318.760.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : REPELITA KALLO
- Jabatan : KEPALA BALAI
- NHK : 884169

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	360.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	140.000.000
1. MOBIL, TOYOTA YARIS VVT-I 1,5 G Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	150.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	500.150.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	500.150.000

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : NINI KUSRINI  
NIK : 7313144111870003  
Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN  
Unit Kerja : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
Sub Unit Kerja : BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
SULAWESI BARAT  
Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
Jenis Laporan : Periodik - 2023  
Tanggal Kirim : 19 Maret 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.